

HAK-HAK WANITA DALAM FIQIH ISLAM

M. Sarbini

Dosen Tetap Prodi Al Ahwal Asy Syakhshiyah, STAI Al Hidayah, Bogor

Abstraksi

Di antara persoalan besar hukum sosial yang banyak menyita perhatian para ahli sejak dahulu adalah masalah wanita. Islam memandang wanita memiliki banyak keistimewaan dan lebih unggul dibandingkan laki-laki. Di dalam Al-Qur'an telah banyak memberitahukan kepada kita semua tentang kedudukan wanita dan emansipasinya dengan kaum laki-laki. Wanita memiliki esensi dan identitas yang sama dengan laki-laki. Bahkan satu surat di dalam Al-Qur'an mengandung nama perempuan yakni surat "An-Nisa". Rasulullah SAW ketika ditanya siapa orang yang paling berhak untuk dihormati dan didahulukan, beliau menjawab "ibumu! ibumu! ibumu! kemudian ayahmu". Begitu mulianya seorang wanita di dalam pandangan Islam. Sebagaimana seorang pria, wanitapun menjadi obyek perintah-perintah hukum syari`at. Pahala diperuntukkan bagi siapa yang beramal dengan ikhlas dan sempurna. Rasulullah saw diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Akan tetapi, hal ini tidak menghilangkan adanya perbedaan antara pria dan wanita dalam beberapa hak, karena perbedaan dasar hak-hak tersebut.

Wanita adalah saudara kandung pria. Hikmah syar`inya, Allah swt telah mengangkat anak Adam as sebagai khalifah di muka bumi dan untuk memakmurkannya berdasarkan syari`at-Nya. Kemudian, diciptakan dari jiwanya wanita yang dapat membantunya menunaikan misi penting tersebut.

Pemakmuran bumi ditugaskan kepada manusia yang terdiri dari laki-laki dan wanita. Penjabaran tugas ini dapat dilihat dalam uraian fiqih Islam yang begitu cermat sesuai dengan fitrah dan tujuan penciptaan manusia.

A. PENDAHULUAN

Islam tidak mengenal diskriminasi atau penganakemasan terhadap satu golongan tertentu. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Adapaun yang membedakan adalah tingkat keimannya. Di dalam dunia Islam, wanita memiliki kedudukan yang mulia. Bahkan

kelak ketika di surga, wanita dunia yang beriman lebih baik dan lebih cantik daripada bidadari. Sebab, tidaklah sama antara orang yang bekerja keras, beribadah, dikenai taklif (tugas kewajiban) serta musibah atau ujian yang harus dihadapi dengan makhluk yang diciptakan khusus untuk menghuni surga tanpa harus menghadapi semua itu.

Tidak hanya laki-laki yang bisa meraih derajat tinggi di akhirat. Kaum wanitapun juga bisa meraih prestasi gemilang itu, bahkan beberapa di antaranya bisa mencapai tingkatan sempurna sehingga surgapun merindukan kehadiran mereka.

Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan terkadang mendapatkan diskriminasi dan anggapan sebelah mata atas dirinya. Diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga (antara suami dan istri), hingga kehidupan yang dilaluinya dalam masyarakat. Dengan adanya diskriminasi inilah maka kemudian banyak pihak terutama perempuan sendiri menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya.

Salah satu ilmu pengetahuan penting dalam Islam adalah kajian fiqh Islam yang mempresentasikan hukum-hukum syari'at kehidupan. Sejauh manakah hak-hak wanita tertuang dalam aturan-aturan Fiqh Islam? Bidang-bidang apa saja yang menjadi hak-hak wanita dalam Fiqh Islam?

B. PEMBAHASAN

1. Hak-hak Wanita

Dalam bahasa Arab lafal “ Hak” berasal dari kata : *حق - يحق - حقا* yang berarti nyata, pasti dan tetap¹ Sedangkan Menurut Mushtafa Az-Zarqa', hak ialah :

اِخْتِصَاصٌ يُقَرَّرُ بِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةً أَوْ تَكْلِيفًا

¹ A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya, hlm.282.

“Suatu fasilitas yang ditetapkan oleh syara’ sebagai kekuasaan atau beban hukum.”²

Sedangkan menurut Abdul Madjid, hak ialah :

اِخْتِصَاصٌ يُمْكِنُ صَاحِبُهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ
بِالتَّصَرُّفِ وَالْإِنْتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ

“Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i.”³

Sinonimnya *shahha wa tsabata wa shadaqa* (sah, tetap, pasti, dan benar).⁴

Dalam definisi di atas, dikemukakan bahwa hak itu adalah suatu ikhtisas, yakni hubungan khusus dengan orang tertentu, seperti hak penjual untuk menerima harga barang, yang khusus dimilikinya (penjual), atau hak pembeli untuk menerima barang yang telah dibelinya, yang khusus dimiliki olehnya dan tidak dimiliki oleh orang lain. Apabila tidak ada hubungan khusus dengan seseorang, melainkan kebolehan secara umum, seperti berburu, atau memanfaatkan jalan umum, maka hal itu tidak disebut sebagai hak, melainkan rukhsah yang berlaku secara umum untuk semua orang.⁵

Definisi di atas juga menyebut bahwa hak itu merupakan kekuasaan atau beban. Kekuasaan adakalanya kekuasaan terhadap orang, seperti hak hadhanah dan hak perwalian. Adakalanya kekuasaan atas

² DRS. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, AMZAH, Jakarta, 2010, Hlm.21.

³ Abdul Madjid, *pokok-pokok fiqh mu’amalah dan hukum kebendaan dalam islam*, hlm.36.

⁴ Op.Cit, hlm.19.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1986, Hlm. 9.

sesuatu barang tertentu, seperti hak milik tanah, rumah, atau lain-lain. Taklif pula adalah suatu kewajiban yang berhubungan dengan mal seperti melunasi hutang, atau berkaitan dengan mewujudkan tujuan tertentu, seperti pelaksanaan pekerjaan oleh seorang tenaga kerja.⁶

Definisi di atas juga menyatakan hak itu ditetapkan oleh syara'. Hal ini dikarenakan dalam pandangan Islam, hak itu adalah anugerah atau pemberian dari Allah yang disandarkan kepada hukum syara'. Dengan demikian, sumber hak itu adalah dari Allah⁷

Hak asasi perempuan, adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dalam khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Dalam pengertian tersebut dijelaskan bahwa pengaturan mengenai pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. System hukum tentang hak asasi manusia yang dimaksud adalah system hukum hak asasi manusia baik yang terdapat dalam ranah internasional maupun nasional.

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002). Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

⁶ Ibid

⁷ Ibid

John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994). Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Hak asasi Perempuan merupakan bagian dari Hak asasi manusia. penegakan hak asasi perempuan merupakan bagian dari penegakkan hak asasi manusia. Sesuai dengan komitmen internasional dalam Deklarasi PBB 1993, maka perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak baik lembaga-lembaga Negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) maupun Partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bahkan warga Negara secara perorangan punya tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan.

2. Fiqih Islam

Term fiqh yang diderivatkan dari *faqih* – *yafqohu wa fiqhan* secara etimologi adalah: “Pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu”. Sedangkan secara terminologis, para fuqoha memberikan beberapa definisi:

Ada yang mengartikan fiqh dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang diperoleh dengan ijtihad. Ada pula

yang mengatakan bahwa fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara` yang bersifat praktis dengan cara pencarian dalil. Pendapat yang lebih masyhur adalah yang mengartikan fiqih sebagai hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dengan cara pencaroon dalil.

Ada empat unsur utama yang terkandung dalam tiga definisi tersebut:

- a. Ilmu ini berbicara tentang hukum syara, sehingga selain cabang ilmu ini tidak dapat disebut dengan fiqih.
- b. Hukum syara tersebut berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf yang bersifat praktis dan konkret, sehingga perbuatan manusia yang abstrak tidak termasuk wilayah kajian fiqih. Hal inilah yang dimaksud dengan wilayah otoritas ijtihad manusia, yaitu perbuatan manusia yang konkret, sedangkan perbuatan yang abstrak hal ini menjadi wilayah otoritas Tuhan, sebagaimana pernyataan fuqoha: Kami hanya mentepkan hukum dengan tanda-tanda konkret (saja) dan Allah yang menghukumi dengan tanda-tanda abstrak”.
- c. Pengetahuan itu diperoleh dengan cara ijtihad atau istidlal, yaitu mencurahkan segala potnesi dan kesempatan dalam rangka mencapai kesimpulan hukum yang diderivatkan dari sumber pokoknya. Dengan kata lain, bahwa ilmu ini hanya dapat diperoleh oleh orang-orang yang sudah mencapai kualifikasi mujtahid, bukan sembarang orang atau dengan cara main-main saja.
- d. Bahwa sumber-sumber hukum tersebut sudah terperinci menurut

cabangnya masing-masing, baik yang bersifat qath`i maupun zhanni.⁸

3. Hak-hak wanita dalam Fiqih Islam

Islam adalah agama yang abadi, penutup semua agama. Karakteristik Islam – di antaranya- adalah menyeluruh dan moderat. Islam memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Wanita tidak mendapat perlindungan sejak masa kecil sampai mati melainkan dalam naungan agama Islam.

Wanita adalah individu masyarakat muslim yang berhak bersenang-senang dengan ruh dan jasad. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Bertolak dari sinilah, muncul hadis tentang keharaman terhadap darah, harga diri, harta benda dan kemuliaan dengan lafaz yang umum.

Sebagaimana laki-laki adalah pemimpin dan akan dimintakan pertanggungjawabannya, maka wanita juga pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintakan pertanggung jawabannya pula atas kepemimpinannya, atas anak-anaknya dan agamanya. Wanita mendapat pahala dan balasan atas amal pebuatannya, disiksa dan ditanya perihal kesalahan-kesalahannya.

Wanita memiliki kebebasan secara penuh terhadap hak kepemilikan dengan segala cara yang dibolehkan dan memiliki hak secara penuh dalam mengungkapkan pendapat ketika diminta menyampaikan pendapat. Wanita juga berhak untuk menuntut haknya jika merasa dilanggar. Secara keseluruhan, Islam telah menjamin hidup mulia dan tenang bagi laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan antara

⁸ Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. Hal. 32-34

keduanya. Masing-masing mereka saling melengkapi. Hanya saja pria lebih tinggi satu tingkatan di atas wanita, yaitu tingkatan kepemimpinan yang harus diemban untuk mensukseskan kehendak mereka berdua. Semua itu tidak merendahkan hak wanita dan mengurangi kemuliaannya, bahkan mengangkat kedudukannya dan menempatkannya di tempat yang layak.⁹

Beberapa contoh hak-hak wanita yang tertulis dalam buku-buku fiqh para ulama mazhab di antaranya adalah:

a. Hak Shalat Berjamaah

Zakaria Al-Anshari (w. 926 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Syafi'iyah* menuliskan dalam kitabnya *Asna al-Mathalib Syarah Raudh Al-Thalib* sebagai berikut:

ولا فرض فيها أي الجماعة (على النساء بل
تستحب) في حقهن

“kaum wanita tidak wajib melakukan shalat berjamaah akan tetapi disunnahkan”.¹⁰

Al-Buhuti (w. 1051 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Hanabilah* menuliskan dalam kitabnya *Kasysyaf Al-Qinna'* sebagai berikut :

وتستحب الجماعة لئساء

“Disunnahkan shalat berjamaah bagi wanita”.¹¹

Al-Kasani (w. 587 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Hanafiyah* menuliskan dalam kitabnya *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'* sebagai berikut:

(أما النساء فلأن خروجهن إلى الجماعات
فتنة.

“(Adapun) wanita (dilarang menghadiri jama'ah di masjid) dikarenakan keluarnya mereka untuk menghadiri jama'ah dianggap sebagai suatu fitnah (mendatangkan kemadhorotan)”.¹²

Al-Marghinani (w. 593 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Hanafiyah* menuliskan dalam kitabnya *Al-Hidayah Syarah Bidayat al-Mubtadi* sebagai berikut:

ويكره لهن حضور الجماعات يعني الشواب
منهن لما فيه من خوف الفتنة

“Perempuan dimakruhkan menghadiri jamaah, yaitu para pemudinya karena ditakutkan akan timbul fitnah”.¹³

Al-Hashkafi (w. 1088 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Hanafiyah* menuliskan dalam kitabnya *Al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar* sebagai berikut:

ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة وعيد
ووعظ مطلقا

perempuan dimakruhkan menghadiri jamaah walaupun untuk shalat jumat,

⁹ Ali Al-Hajjaj al-Ghamidi, *Fikih Wanita (Dalil al-Mar'ah al-Muslimah)*, terjemah Ahmad Syarif, Solo: Aqwam, 2015, cet ke-7, hal. Xxiv-xxv

¹⁰ Zakaria bin Muhammad al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarah Raudh al-Thalib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Thayyibah, 1422 H. jilid 1 hal. 209

¹¹ Manshur bin Yunus Al-Buhuti, *Kasysyaf Al-Qinna'*, Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H', jilid 1 hal. 456

¹² `Alau al-Din al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai'*, Dar al-Kuttub al-'Arabiyy, 1433 H, jilid 1 hal. 155

¹³ Ali bin Abu Bakr al-Marghiyani, *Al-Hidayah Syarah Bidayatu Al-Mubtadi*, Beirut: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1420 H i, jilid 1 hal. 58

shalat ied atau untuk mendapatkan nasihat, secara mutlak.¹⁴

Muhammad bin Abdullah al-Khurasani (w. 1101 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Malikiyah menuliskan dalam kitabnya *Syarh Mukhtashar Khalil* sebagai berikut:

أنه يجوز ويندب للمتجالة المسنة التي لا أرب للرجال فيها أن تخرج إلى صلاة العيد والاستسقاء وأحرى للفرس، أما متجالة لم ينقطع أرب الرجال منها بالجملة فهذه تخرج للمسجد ولا تكثر التردد كما في الرواية، ويجوز جوازاً مرجوحاً للشابة أن تخرج للمسجد في الفرض وجنازة أهلها وقرباتها لا لذكر ومجالس علم وإن انعزلت أنه

“Bahwasanya boleh bagi seorang wanita yang telah senja usianya dan tidak menarik perhatian lelaki untuk keluar guna menjalankan Shalat ied, istisqa’ dan terlebih lagi untuk Shalat fardlu, adapun untuk wanita yang telah senja usianya tetapi masih menarik perhatian lelaki secara umum maka ia (diperbolehkan) ke masjid tetapi tidak sering demikian yang terdapat dalam riwayat ini, sedangkan untuk wanita muda boleh ke masjid untuk menunaikan Shalat fardlu dan menghadiri jenazah keluarga serta kerabatnya. Namun (tidak diperbolehkan ke masjid) untuk menghadiri majlis ilmu meskipun menjadikan ia terasingkan”.¹⁵

¹⁴ Muhammad bin Ali Al-Hashkafi, *Al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1423 H, jilid 1 hal. 77

¹⁵ Muhammad bin Abdullah al-Khurasani, *Syarh Mukhtashar Khalil*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, jilid 2 hal. 35

Al-Dardir (w. 1241 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Malikiyah menuliskan dalam kitabnya *al-Syarhu al-Shaghir* sebagai berikut:

(و) جَازَ (خُرُوجُ) امْرَأَةٍ (مُتَجَالَةً) لَا أَرْبَ لِلرِّجَالِ فِيهَا (لِمَسْجِدٍ) تُصَلِّي مَعَ الْجَمَاعَةِ بِهِ. (و) خُرُوجُ (لِكَعْبِدٍ) أَدْخَلَتْ الْكَافُ الْإِسْتِسْقَاءَ وَالْكَسُوفَ وَجِنَازَةَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ. (و) جَازَ خُرُوجُ (شَابَةٍ غَيْرِ مُفْتِنَةٍ لِمَسْجِدٍ وَجِنَازَةَ قَرِيبٍ) مِنْ أَهْلِهَا، (وَلَا يَقْضِي عَلَى زَوْجِهَا بِهِ) أَيُّ الْخُرُوجِ لِمَا ذُكِرَ أَنَّ لَهُ مَنَعَهَا، وَأَمَّا مَخْشِيَةُ الْفِتْنَةِ فَلَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ مُطْلَقًا.

“Wanita yang telah lanjut usia diperbolehkan keluar menuju masjid untuk menunaikan shalat jama’ah, sebagaimana boleh keluar untuk menunaikan shalat ‘Ied, istisqa, kusuuf (gerhana) dan shalat janazah. Dan dibolehkan pula bagi perempuan yang masih muda untuk pergi ke masjid dalam rangka menshalatkan janazah keluarganya apabila tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah (mudharat) sedangkan dalam rangka menshalatkan janazah suaminya maka tidak diperbolehkan bagi wanita tersebut untuk menunaikan shalatnya di masjid, sebab hal tersebut menjadi larangan baginya, sedangkan bagi wanita yang dikhawatirkan akan timbulnya fitnah (mudharat) baginya maka secara mutlak tidak diperbolehkan keluar menuju masjid”.¹⁶

Muhammad Illisy (w. 1299 H), salah satu ulama di kalangan mazhab

¹⁶ Muhammad bin Ahmad Ad-Dardir, *Al-Syarhu al-Shaghir*, Beirut: Dar al-Fikr, tt jilid 1 hal. 446

Malikiyah menuliskan dalam kitabnya *Manhu al-Jalil Syarh 'Ala Mukhtashar Khalil* sebagai berikut:

(و) جاز (خروج) امرأة (متجالة) لا إرب للرجال فيها غالباً (ل) صلاة (عيد و) صلاة (استسقاء) وللغرض بالأحرى ولجنازة أهلها والمتجالة التي لا إرب للرجال فيها أصلاً تخرج لما ذكر ولمجالس العلم والذكر ولجنازة الأجنبي. (و) جاز خروج امرأة (شابة) غير فارهة في الشباب والجمال وإلا فلا تخرج لشيء أصلاً (لمسجد) للصلوات الخمس مع الجماعة ولجنازة أهلها وقرباتها بشرط عدم الطيب والزينة، وأن لا تخشى منها الفتنة، وأن تخرج في رديء ثيابها، وأن لا تزاحم الرجال، وأن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم.

“Boleh bagi seorang wanita yang telah senja usianya dan tidak menarik perhatian kebanyakan lelaki untuk keluar guna menjalankan Shalat ied, istisqa’dan terlebih lagi untuk Shalat fardlu dan menghadiri janazah keluarganya, sedangkan untuk wanita yang telah senja dan tidak menarik perhatian lelaki sama sekali (diperbolehkan) untuk keluar (ke masjid) seperti yang telah disebutkan, untuk menghadiri majlis ilmu dan dzikir dan untuk menghadiri jenazah orang lain sedangkan bagi pemuda yang tidak menampakkan sifat muda dan kecantikannya diperbolehkan untuk keluar masjid dengan syarat tidak memakai wewangian dan berhias, tidak takut akan adanya fitnah, keluar dengan baju yang

biasa, tidak berdesakan dengan lelaki dan jalannya aman dari bahaya. Apabila tidak demikian maka tidak boleh baginya keluar ke masjid, jika keluar maka haram”.¹⁷

Al-Mawardi (w. 450 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Syafi'iyah* menuliskan dalam kitabnya *Al-Hawi al-Kabir* sebagai berikut:

من السنة لمن الصلاة في بيوتهم دون المساجد

“Disunnahkan bagi wanita shalat di rumah-rumah mereka bukan di masjid”.¹⁸

Al-Khatib al-Syirbini (w. 977 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Syafi'iyah* menuliskan dalam kitabnya *Mughni Al-Muhtaj* sebagai berikut :

وجماعة المرأة والخنثى في البيت أفضل منها في المسجد

Shalat jamaahnya wanita dirumah itu lebih baik dari pada shalat dimasjid.¹⁹

Al-Ramli (w. 1004 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Syafi'iyah* menuliskan dalam kitabnya *Nihayah al-Muhtaj* sebagai berikut :

ويكره لها حضور جماعة المسجد إن كانت مشتهة ولو في ثياب مهتة، أو غير مشتهة وبها

شيء من الزينة أو الريح الطيب

“Dimakruhkan baginya (wanita) ikut Shalat berjamaah di masjid jika dikhawatirkan menimbulkan syahwat

¹⁷ Muhammad bin Ahmad 'Illisy, *Manhu al-Jalil Syahr 'Ala Mukhtashar Khalil*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, jilid 1 hal. 373

¹⁸ Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1426 H, jilid 2 hal. 163

¹⁹ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1426 H, jilid 1 hal. 230

walaupun memakai pakaian yang jelek, atau tidak menimbulkan syahwat tapi mengenakan perhiasan atau wewangian”.²⁰

Al-Buhuti (w. 1051 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Hanabilah* menuliskan dalam kitabnya *Kasysyaf Al-Qinna'* sebagai berikut :

ويباح لهن حضور جماعة الرجال

Diperbolehkan bagi wanita menghadiri jamaah dimasjid.²¹

b. Hak Menentukan Pilihan Calon Suami Pendamping

Ibnu Taimiyah berkata dalam kitabnya “*Majmu` Fatawa*”:

"وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح فهذا مخالف للأصول والعقول ، والله لم يُسَوِّغ لوليها أن يُكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها ، ولا على طعام ، أو شراب ، أو لباس ، لا تريده ، فكيف يكرهها على مباحة ومعاشرة من تكره مباحته ! ، ومعاشرة من تكره معاشرته!

والله قد جعل بن الزوجين مودةً ورحمة ، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه ، فأبى مودةً ورحمةً في ذلك !! "

“Mengawinkan (anak wanita) untuk menikah padahal dia tidak menyukainya bertentangan dengan ushul dan akal yang sehat. Demi Allah, seorang wali tidak boleh memaksa anak putrinya untuk

menjual, mengupahi kecuai dengan izinnya, begitu pula untuk makan, minum atau pakaian yang dia tidak inginkan. Bagaimana mungkin wali dibolehkan memaksanya untuk sebuah kerelaan menyerahkan kehormatan diri dan hubungan privasi dengan orang yang dia tidak sukainya. Padahal Allah menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kedua pasangan (suami dan istri) yang tidak mungkin bisa dicapai pada hubungan yang saling membenci dan menjijikannya”.²²

As-Sarakhsi (w. 483 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Hanafiyah* menuliskan dalam kitabnya *Al-Mabsuth* sebagai berikut :

في بعض الروايات «سكوتها رضاها»، وذلك على أن رضاها شرطٌ وأنَّ السَّكوتَ منها دليلٌ على رضاٍ فيكتفى به شرعاً لما روي أن عائشة - رضي الله عنها - «قالت يا رسول الله: إنَّها تستحي فتسكت، فقال - صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم - سكوتها رضاها»

Dalam beberapa riwayat - diamnya seorang perempuan adalah keridhaannya -, dengan begitu maka ridhanya seorang perempuan adalah syarat, dan diamnya seorang perempuan itu ridhanya, maka cukup bagi nya secara syar'i seperti riwayat dari 'Aisyah Radhiyallahu 'anha.²³

As-Sarakhsi (w. 483 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Hanafiyah*

²⁰ Muhammad bin Ahmad Syihabuddin al-Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984, cet ke-1, jilid 2 hal. 140

²¹ *Al-Buhuti, Kasysyaf Al-Qinna'*, jilid 1 hal. 456

²² Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah, *Majmu` al-Fatawa*, Saudi Arabia: Majma` Malik Fahd, 1995, cet ke-1, hal. 32/25

²³ Muhammad bin al-Hasan *As-Sarakhsi, Al-Mabsuth*, jilid 4 hal. 19

menuliskan dalam kitabnya *Al-Mabsuth* sebagai berikut :

زَوْجَ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فَأَنْكَرَتْ الرِّضَا (قَالَ): وَإِذَا
 زَوْجَ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فَأَنْكَرَتْ الرِّضَا فَشَهِدَ عَلَيْهَا
 أَخُوهَا وَأَبُوهَا بِالرِّضَا لَمْ تُقْبَلْ؛ لِأَنَّ الْأَبَّ يُرِيدُ
 تَثْمِيمَ مَا بَاشَرَهُ، وَلَوْ شَهِدَ عَلَيْهَا أَخَوَاهَا
 بِالرِّضَا كَانَتْ مَقْبُولَةً؛ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةُ فِي
 شَهَادَتَيْهِمَا عَلَيْهَا

seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kemudian dia tidak ridha) (dia berkata) : jika seorang laki-laki menikahkan anak peempuannya kemudian si anak tidak ridha, kemudian saudara laki-lakinya dan ayahnya bersaksi tentang keridhaannya, maka dia tertolak, karena ayahnya yang berkehendak.²⁴

Ibnul Humam (w. 681 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya *Fathul Qadir* sebagai berikut :

أَنَّ الْبِكْرَ لَا تُخْطَبُ إِلَى نَفْسِهَا عَادَةً بَلْ إِلَى
 وَلِيِّهَا، بِخِلَافِ الثَّيِّبِ، فَلَمَّا كَانَ الْحَالُ أَنَّهُمَا
 أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَخُطْبَتُهَا تَقَعُ لِلْوَالِيِّ صَرَخَ بِإِجَابِ
 اسْتِنْمَارِهِ إِيَّاهَا فَلَا يَفْتَاتُ عَلَيْهَا بِتَزْوِيجِهَا قَبْلَ
 أَنْ يَظْهَرَ رِضَاهَا بِالْخَاطِبِ، عِبَارَةٌ

Perawan itu tidak dilamar untuk dirinya sendiri, akan tetapi atas putusan walinya, lain dengan janda. Lalu ketika dia berhak atas dirinya dan lamaran jatuh ditangan walinya, maka walinya wajib meminta pendapat si wanita, maka tidak boleh

dinikahkan begitu saja sebelum jelas keridhaannya terhadap si pelamar.²⁵

Malik bin Anas (w. 179 H), menuliskan dalam kitabnya *Al-Mudawwanah Al-Kubra* sebagai berikut :

[إنكاح الأب ابنته بغير رضاها] قلت: أرايت إن ردت الرجال رجلا بعد رجل تجبر على النكاح أم لا؟ قال: لا تجبر على النكاح ولا يجبر أحد أحدا على النكاح عند مالك إلا الأب في ابنته البكر وفي ابنه الصغير وفي أمته وعبده والولي في يتيم .

Bab: Ayah menikahkah anak perempuannya tanpa keridhaannya *Ibnu Al-Qasim* mengatakan: Bagaimana pendapatmu tentang perempuan yang selalu menolak laki-laki, apakah dia harus dipaksa untuk menikah atau tidak? Imam *Malik* menjawab: Tidaklah dia dipaksa untuk menikah, dan tidak pula seorang pun boleh memaksa seseorang untuk menikah. Kecuali seorang ayah, dia boleh memaksa anak perempuannya yang masih biker, atau anak laki-lakinya yang masih kecil, atau budak perempuannya, atau budak laki-lakinya. Begitu juga seorang wali boleh menikahkan anak yatim dibawah tanggungannya. .²⁶

Al-Mawardi (w. 450 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Syafi'iyah* menuliskan dalam kitabnya *Al-Hawi Al-Kabir* sebagai berikut :

²⁵ Muhammad bin Abdul Wahid bin Humam, *Fathul Qadir*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, jilid 3 hal. 262

²⁶ Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, jilid 2 hal. 100

²⁴ As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, jilid 5 hal. 35

وأما الأبقار فلهن حالتان حالة مع الآباء، وحالة مع غيرهم من الأولياء. فما حالهن مع الآباء فهن ضربان: صغار، وكبار. فأما صغار الأبقار فللآباء إجبارهن على النكاح فيزوج الأب ابنته البكر الصغيرة من غير أن يراعي فيه اختيارها ويكون العقد لازماً لها في صغرها وبعد كبرها، وكذلك الجد وإن علا يقوم في تزويج البكر الصغيرة مقام الأب إذا فقد الأب. وأما البكر الكبيرة فللأب أو للجد عند فقد الأب أن يزوجهها جبراً كالصغيرة، وإنما يستأذنها على استطابة النفس من غير أن يكون شرطاً في جواز العقد.

bagi wanita-wanita bkr dibagi menjadi dua keadaan yaitu ketika mereka masih bersama dengan ayah mereka dan ketika bersama dengan wali-wali selain ayah mereka. maka ketika mereka bersama dengan ayah mereka ini juga dibagi kembali menjadi dua: bkr sghar (yang belum baligh) dan bkr kibar (yang sudah baligh) bkr yang masih kecil atau belum baligh itu boleh dipaksa oleh ayahnya untuk menikah, maka sang ayah boleh menikahkan anak perempuannya yang masih bkr yang masih kecil tanpa harus memperhatikan keputusannya atau pilihannya, dan akadnya menjadi lazim baginya selama masa kecilnya sampai ia dewasa, begitupula bagi sang kakek dan seterusnya, atau seseorang yang dapat menikahkannya ketika ayahnya sudah tiada. bkr yang sudah besar atau dewasa maka boleh bagi ayahnya atau kakeknya ketika tidak ada ayah untuk menikahkannya secara paksa seperti bkr yang

*masih kecil, untuk masalah izin kepadanya hanya sekedar perlakuan baik dan bukan syarat sahnya akad.*²⁷

An-Nawawi (w. 676 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab sebagai berikut :

ويجوز للاب والجد تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة... فدل على أن الولي أحق بالبكر وإن كانت بالغة فالمستحب أن يستأذنها للخبر وإذنها صماتها... لأنها تستحي أن تأذن لابيها بالنطق فجعل صماتها إذناً، ولا يجوز لغير الاب والجد تزويجها إلا أن تبلغ وتأذن وأما الثيب فإنها ان ذهبت بكارتها بالوطئ فان كانت بالغة عاقلة لم يجز لاحد تزويجها إلا بإذنها ...

*Ayah dan kakek boleh menikahkan 'bkr' tanpa izinnnya baik dia anak-anak (belum baligh) atau sudah dewasa (sudah baligh)...dan ini menunjukkan bahwa wali lebih berhak atas 'bkr'. Dan jika dia sudah baligh maka mustahab meminta izinnnya, dan izinnnya adalah diam, karena dia malu untuk mengungkapkan secara lisan kepada sang ayah bahwa dia mengizinkan maka diamnya adalah izin, dan selain ayah dan kakek tidak boleh menikahkannya tanpa izin. Sedangkan 'tsayyib' yang telah hilang kegadisannya karena jima', jika sudah baligh dan berakal maka siapapun tidak boleh menikahkannya tanpa izinnnya.*²⁸

²⁷ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, jilid 9 hal. 52

²⁸ Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, jilid 16 hal. 165

An-Nawawi (w. 676 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Syafi'iyah* menuliskan dalam kitabnya *Raudhatu Ath-Thalibin* sebagai berikut :

فلأب تزويج البكر الصغيرة والكبيرة بغير إذنها، ويستحب استئذان البالغة. ولو أجبرها، صح النكاح. فلو كان بين الأب وبينها عداوة ظاهرة... فأما الثيب، فلا يزوجه الأب إلا بإذنها في حال البلوغ، والجد كالأب في كل هذا

Seorang ayah boleh menikahkan 'bikr' yang masih anak-anak (belum baligh) dan dewasa (sudah baligh) tanpa meminta izin, dan mustahab meminta izin kepada 'bikr' yang sudah baligh. Dan jika sang ayah menikahkannya dengan paksa maka nikahnya sah, meskipun antara perempuan dan ayahnya tampak permusuhan yang jelas. Sedangkan 'tsayyib', maka sang ayah tidak boleh menikahkannya tanpa izin ketika dia sudah baligh, dan kedudukan kakek sama seperti ayah dalam hal ini.²⁹

Al-Khatib Asy-Syirbini (w. 977 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Syafi'iyah* menuliskan dalam kitabnya *Mughni Al-Muhtaj* sebagai berikut :

واعلم أن أسباب الولاية أربعة، السبب الأول الأبوة وقد شرع فيه فقال (ولالأب) ولاية الإجماع وهي (تزويج) ابنته (البكر صغيرة أو كبيرة) عاقلة أو مجنونة إن لم يكن بينه وبينها عداوة ظاهرة (بغير إذنها) لخبر

الدارقطني: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يزوجه أبوها». ورواية مسلم: «والبكر يستأمرها أبوها» حملت على الندب، ولأنها لم تمارس الرجال بالوطء فهي شديدة الحياء، أما إذا كان بينه وبينها عداوة ظاهرة فليس له تزويجها إلا بإذنها بخلاف غير الظاهرة: لأن الولي يحتاط لموليته لخوف العار وغيره وعليه يحمل إطلاق الماوردي والرويانى الجواز.

sesungguhnya sebab menjadi wali itu ada empat, salah satunya karena ia adalah ayahnya, dan telah disyari'atkan bahwa bagi seorang ayah untuk memaksa anaknya untuk menikah baik ia bikr yang masih kecil ataupun sudah besar, berakal atau gila, tanpa izin anaknya selama belum ada permusuhan yang nampak antara seorang anak dan ayahnya, seperti khabarnya daru al-quthni: tsayyib (janda) dia lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan bikr dinikahkan oleh walinya. Dan dari riwayat mulsim: "dan bagi seorang bikr sang ayah harus meminta izin kepadanya" perintah dalam riwayat ini hukumnya an-nadb, karena anaknya belum berpengalaman dalam masalah pernikahan dan ia sangat pemalu. Akan tetapi, apabila ada permusuhan yang nampak antara mereka, maka sang ayah tidak boleh menikahkannya kecuali meminta izinnya tapi kalau tidak nampak tidak apa-apa, karena ayahnya sangat menjaga anaknya dari aib dan lainnya, Mawardi mengambil pendapat ini secara mutlak dan bagi Ruyani jaiiz..³⁰

²⁹ An-Nawawi, *Raudhatu Ath-Thalibin*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991, cet ke-3, jilid 7 hal. 53

³⁰ Al-Khatib Asy-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj*, jilid 4 hal. 246

Ibnu Qudamah (w. 620 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Hanabilah* menuliskan dalam kitabnya *Al-Kafi fi Fiqhi Al-Imam Ahmad* sebagai berikut :

الشرط الرابع من شروط النكاح: التراضي من الزوجين، أو من يقوم مقامهما؛ لأن العقد لهما، فاعتبر تراضيهما به كالبيع

*syarat yang ke empat dari syarat-syarat menikah adalah: keridaan dari kedua belah pihak (suami dan istri), atau yang menempati posisi mereka (wakil), karena akad nikah tidak terjadi tanpa ada mereka, dan keridhaan mereka seperti keridhaan dalam jual beli..*³¹

Al-Mardawi (w. 885 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Hanabilah* menuliskan dalam kitabnya *Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf* sebagai berikut :

الثاني: رضا الزوجين. فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح إلا الأب، له تزويج أولاده الصغار والمجانين، وبناته الأبنكار بغير إذنهم

*Al Inshaf: Syarat yang kedua adalah: Keridhaan laki-laki dan perempuan tersebut. Jika keduanya tidak ridha atau salah satunya tidak ridha maka nikahnya tidak sah kecuali dari segi bapak. Ia berhak menikahkan anaknya yang masih kecil, atau anak perempuan gadisnya, ataupun jika anaknya gila.*³²

Al-Buhuti (w. 1051 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Hanabilah*

menuliskan dalam kitabnya *Kasysyaf Al-Qinna'* sebagai berikut :

[الشَّرْطُ الثَّانِي رِضَى الزَّوْجَيْنِ] الشَّرْطُ (الثَّانِي رِضَاهُمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ (أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا فَإِنَّ لَمْ يَرْضِيَا) أَيْ الزَّوْجَانِ (أَوْ لَمْ يَرْضَ) أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُمَا فَاعْتَبِرَ تَرَاضِيَهُمَا بِهِ كَالْبَيْعِ

*Syarat kedua dari syarat nikah adalah keridha'an kedua belah pihak atau yang menempati posisi mereka, maka apabila keduanya belum saling ridha, atau salah satu dari keduanya tidak ridha, maka pernikahan tidak sah, karena akad adalah milik calon suami dan calon istri, dan dianggap keridha'an mereka seperti keridha'an dalam akad jual beli..*³³

Ibnu Hazm (w. 456 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Dzhahiriyah* menuliskan dalam kitabnya *Al-Muhalla bil Atsar* sebagai berikut :

[مَسْأَلَةٌ إِذْنُ الْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ] مَسْأَلَةٌ: وَكُلُّ نَيْبٍ فَإِذْنُهَا فِي نِكَاحِهَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَلَامِهَا بِمَا يُعْرَفُ بِهِ رِضَاهَا. وَكُلُّ بَكْرٍ فَلَا يَكُونُ إِذْنُهَا فِي نِكَاحِهَا إِلَّا بِسُكُوتِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَلَزِمَهَا النِّكَاحُ، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ بِالرِّضَا أَوْ بِالْمَنْعِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَلَا يَنْعَقِدُ بِهَذَا نِكَاحٌ عَلَيْهَا .

Semua janda jika ingin dinikahkan maka harus melalui izinnya dan ridhanya yang diketahui lewat ucapan yang biasa dianggap kalau hal tersebut adalah ridhanya. Namun perawan idzinnya dalam menikahkannya hanya lewat diamnya, jika ia diam maka ia dinikahkan, namun jika ia

³¹ Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-Kafi fi Fiqhi Al-Imam Ahmad*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1990, cet ke-1, jilid 3 hal. 18

³² Alauddin Ali bin Sualiman Al-Mardawi, *Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf*, Kairo: Hajr Li al-Thiba`ah, 1995, Cet ke-1, jilid 8 hal. 52

³³ Al-Buhuti, *Kasysyaf Al-Qinna'*, jilid 5 hal. 42

mengatakan *ridha* atau tidak *ridha* maka ia tidak dapat dinikahkan.³⁴

c. Hak Jima`

Al-Kasani (w. 587 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Hanafiyah* menuliskan dalam kitabnya *Badai' al-Shanai' fi Tartibi al-Syarai'* sebagai berikut:

وللزوجة أن تطالب زوجها بالوطء؛ لأن حله لها حقها كما أن حلها له حقه، وإذا طالبتة يجب على الزوج، ويجبر عليه في الحكم مرة واحدة والزيادة على ذلك تجب فيما بينه، وبين الله تعالى من باب حسن المعاشرة واستدامة النكاح، فلا يجب عليه في الحكم عند بعض أصحابنا

*Seorang istri berhak untuk meminta jima' kepada suaminya, karena pelayanan seksual merupakan hak istri sebagaimana itu juga menjadi hak suami, dan apabila sang istri memintanya maka wajib bagi suaminya untuk memenuhinya, dan Hukum wajib baginya hanyalah sekali saja, sebagaimana Allah telah menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari tata cara saling mempergauli dengan baik dan untuk kelanggengan pernikahan. Dan menurut sebagian ulama Hanafiyah tidak wajib.*³⁵

Ibnu Juzai al-Kalbi (w. 741 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Malikiyah* menuliskan dalam kitabnya *Al-Qawanin al-Fiqhiyah* sebagai berikut :

³⁴ Ali bin Ahmad bin Hazm, *Al-Muhalla bil Atsar*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, jilid 9 hal. 57

³⁵ Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai'*, jilid 2 hal. 331

الجماع واجب على الرجل للمرأة إذا انتفى العذر

*Jima hukumnya wajib bagi suami terhadap istrinya jika suaminya tidak punya udzur untuk menolak.*³⁶

Zakaria Al-Anshari (w. 926 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Syafi'iyah* menuliskan dalam kitabnya *Asna al-Mathalib Syarah Raudh al-Thalib* sebagai berikut

في الجماع و بقية الاستمتاع مستحبة لا واجبة لأن ذلك يتعلق بالنشاط والشهوة وهو لا يملكها

*Jima' dan hal-hal yang terkait dengan istimta' hukumnya mustahab (dianjurkan) tidak wajib, sebab hal itu berkaitan dengan kondisi fisik dan gairah/syahwat. Dan suami tidak selalu memilikinya.*³⁷

Al-Mardawi (w. 885 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Hanabilah* menuliskan dalam kitabnya *Al-Inshaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf* sebagai berikut

وأما نفس الاستمتاع فقال القاضي لا يجب وأدapun *istimta'* sendiri menurut *Al-Qadhi* hukumnya tidak wajib.³⁸

Ibnu Hazm (w. 456 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Dzhahiriyyah* menuliskan dalam kitabnya *Al-Muhalla bil Atsar* sebagai berikut :

³⁶ Muhammad bin Ahmad Juzai Al-Kalbi, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*, jilid 1 hal. 141 | Nisa

³⁷ Zakaria Al-Anshari, *Asnal Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib*, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2000, cet ke- 1, jilid 3 hal. 229 |

³⁸ Al-Mardawi, *Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf*, jilid 8 hal. 13

وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلك وإلا فهو عاص لله تعالى

*Wajib bagi laki-laki untuk menggauli istrinya minimal satu kali di masa sucinya jika ia mampu melakukannya. Bila dia mampu tapi tidak melakukannya maka ia berdosa.*³⁹

d. Hak Nafkah

Ibn al-Humam (w. 681 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Hanafiyah* menuliskan dalam kitabnya *Fath al-Qadir* sebagai berikut :

النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكنائها

*Nafkah seorang istri -muslim atau kafir- menjadi kewajiban suaminya, jika sang istri menyerahkan dirinya dirumah suaminya maka wajib bagi suami untuk memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal.*⁴⁰

Ibn Nujaim (w. 970 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Hanafiyah* menuliskan dalam kitabnya *Al-Bahr al-Raiq Syarah Kanz al-Daqaiq* sebagai berikut :

وأما أسباب وجوب هذه النفقة أي نفقة الزوجية، فقال أصحابنا بسبب وجوبها استحقاق الحبس الثابت بالنكاح للزوج عليها،

*Adapun sebab wajibnya nafkah seorang istri, menurut pandangan ulama madzhab kami adalah karena adanya hak untuk memerintahkan istri tetap tinggal dirumah suaminya itu selama meraka berada dalam ikatan pernikahan.*⁴¹

An-Nafarawi (w. 1126 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Malikiyah* menuliskan dalam kitabnya *Al-Fawakih Ad-Dawani* sebagai berikut :

والحاصل أن المدخول بها لها النفقة بشرط بلوغ الزوج ويسره، ولو كانت غير مطيقة للوطء لصغرها أو مرضها، وأما غير المدخول بها فإنما يجب لها النفقة إذا دعيت إلى الدخول مع إطاقتها وبلوغ الزوج، لا إن كانت غير مطيقة لصغرها أو مرضها... فتلخص أن نفقة المدخول بها تجب بشرطين: بلوغ الزوج، ويسره، وغير المدخول بها بأربع شروط: بلوغ الزوج، وإطاقتها، والدعوى للدخول، ويسر الزوج، ويفهم من الإطاعة عدم المانع من الوطء.

Jadi, bahwa seorang istri yang belum dukhul dengan suaminya ia berhak mendapat nafkah dengan syarat jika suaminya sudah baligh dan mampu, walaupun si istri tidak mampu dukhul karena ia masih kecil atau ia mempunyai penyakit. Namun jika ia belum dukhul maka ia tetap berhak mendapat nafkah jika suaminya mengajaknya dukhul sedang si istri mampu dan suami sudah baligh.

³⁹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bil Atsar*, jilid 9 hal. 174

⁴⁰ Ibnul Humam, *Fathul Qadir*, jilid 4 hal. 378

⁴¹ Zainuddin bin Nujaim, *Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt, jilid 4 hal. 188

Bukan karena ketidakmampuan istri yang disebabkan usianya masih kecil atau terdapat penyakit pada dirinya. Dapat disimpulkan bahwa seorang istri yang sudah dukhul berhak mendapat nafkah dengan dua syarat: Suami yang baligh dan mampu. Sedangkan istri yang belum dukhul berhak mendapat nafkah dengan empat syarat: suami yang baligh, kemampuan istri, ajakan suami untuk dukhul, dan suami mampu. Yang dimaksud dengan kemampuan disini adalah tidak adanya hal yang menghalangi istri untuk dijima'.⁴²

Al-Imam Asy-Syafi'i (w. 204 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Al-Umm sebagai berikut :

إن كانت بكرا ولم تمتنع هي من الدخول عليه
وجب عليه نفقتها كما تجب عليه إذا دخل
بها

Seorang perawan berhak mendapatkan nafkah dari suaminya apabila tidak ada penghalang terjadinya dukhul, sebagaimana ia berhak mendapatkan nafkah setelah dukhul.⁴³

Abul Khatab Al-Kalwadzani (w. 510 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Al-Hidayah 'ala Madzhabi Al-Imam Ahmad sebagai berikut :

تجب نفقة الزوجة على زوجها إذا بذلت
تسليم نفسها إليه. وكانت ممن توطأ مثلها

⁴² Ahmad bin Ghanin Syihabuddin An-Nafarawi, *Al-Fawakih Ad-Dawani Ala Risalah Ibnu Abi Zaid al-Qarawani*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, jilid 2 hal. 23

⁴³ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1990, jilid 5 hal. 96

وسواء كان الزوج كبيرا يمكنه الوطاء أو كان

عبدا أو مجنوناً أو صغيراً لا يمكنه الوطاء

Seorang istri berhak mendapat nafkah dari suaminya jika ia sungguh-sungguh menyerahkan dirinya untuk suaminya, dan istri termasuk perempuan yang bisa dijima' baik suaminya sudah dewasa dan bisa melakukan jima', ataupun suami tersebut budak, atau gila, atau masih kecil dan tidak bisa melakukan jima'.⁴⁴

Ibnu Hazm (w. 456 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Dzhahiriyah menuliskan dalam kitabnya Al-Muhalla bil Atsar sebagai berikut :

مسألة: وينفق الرجل على امرأته من حين
يعقد نكاحها دعي إلى البناء أو لم يدع - ولو
أنها في المهد - ناشزا كانت أو غير ناشز، غنية
كانت أو فقيرة، ذات أب كانت أو يتيمة، بكرا
أو ثيبا، حرة كانت أو أمة - على قدر ماله-

Dan seorang suami wajib menafkahi istri semenjak akad nikah terjadi, baik istrinya itu sudah diajak jima' maupun belum (istri masih kecil) baik istrinya nusyuz maupun tidak, kaya maupun miskin, masih mempunyai ayah ataupun yatim, gadis maupun janda, merdeka maupun budak, sesuai kadar harta si suami.⁴⁵

e. Hak Mahar

Al-Babarty (w. 786 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Hanafiyah

⁴⁴ Mahmud bin Ahmad Abul Khatab Al-Kalwadzani, *Al-Hidayah 'ala Madzhabi Al-Imam Ahmad*, Kairoh: Muassasah Gharras, 2004, Cet ke-1 jilid 0 hal. 496

⁴⁵ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bil Atsar*, jilid 9 hal. 249

menuliskan dalam kitabnya *Al-'inayah Syarhul Hidayah* sebagai berikut :

والمهر هو المال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع، إما بالتسمية أو بالعقد

*Mahar adalah sejumlah harta yang diwajibkan kepada suami dalam suatu akad nikah sebagai imbalan halalanya jima', baik dengan sebab penyebutan mahar atau karena adanya akad.*⁴⁶

Ash-Shawi (w. 1241 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Malikiyah* menuliskan dalam kitabnya *Hasyiatu Ash-Shawi Ala Asy-Syarhi Ash-Shaghir* sebagai berikut :

(والصداق) بفتح الصاد - وقد تكسر - ويسمى مهرا أيضا: وهو ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها

*Shadaq, disebut juga mahar yaitu sesuatu yang diberikan pada istri sebagai bentuk imbalan istimewa.*⁴⁷

Al-Malibari (w. 987 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Syafi'iyah* menuliskan dalam kitabnya *Fathul Mu'in* sebagai berikut :

وهو ما وجب بنكاح أو وطء

*Sesuatu yang wajib diberikan sebab adanya pernikahan atau jima'.*⁴⁸

Al-Buhuti (w. 1051 H), salah satu ulama di kalangan mazhab *Hanabilah*

menuliskan dalam kitabnya *Kasysyaf Al-Qinna'* sebagai berikut :

(وهو) أي الصداق (العوض في النكاح) سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضيهما أو الحاكم

Pengertian As-Shadaq adalah pemberian dalam pernikahan baik itu disebutkan pada saat akad atau sesudahnya dengan ridha dari keduanya ataupun dari hakim.

f. Hak Waris

Taqiyuddin al-Husaini salah satu ulama mazhab *Syafi'iyah* dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar*: 1/26 menerangkan:

وأما النساء فالوراثات منهن سبع: البنت وبنت الابن إلى آخره، وما ذكره على سبيل الإيجاز، وأما على سبيل البسط فعشرة: البنت وبنت الابن وإن سفلت والأم والجدة للأب والجدة للأم وإن علتنا والأخت للأبوين والأخت للأب والأخت للأم والزوجة والمعتقة، وهؤلاء أيضاً مجمع على توريثهم، وإذا اجتمعن جميعهن لم يرث منهن إلا خمسة: الزوجة والبنت وبنت الابن والأم والأخت من الأبوين، وإذا اجتمع من يمكن اجتماعه من الصنفين: أعني الرجال والنساء، ورث الأبوان والابن والبنت ومن يوجد من الزوجين، والدليل على أن من ذكرنا وارث الاجماع كما مر والنصوص الآتية.

"Ahli waris dari kalangan wanita ada 7 orang, yaitu: anak, cucu wanita dari anak laki-laki sampai berjumlah 7 orang yang

⁴⁶ Muhammad bin Muhammad Al-Babarty, *Al-'inayah Syarhul Hidayah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, jilid 3 hal. 316

⁴⁷ Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi, *Hasyiatu Ash-Shawi Ala Asy-Syarhi Ash-Shaghir*, Kairoh: Dar al-Ma`arif, tt, jilid 2 hal. 428

⁴⁸ Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, jilid 0 hal. 485

disebut secara ringkas. Sebenarnya jika dirinci, ahli waris wanita itu berjumlah 10 orang: anak wanita, cucu wanita dari anak laki-laki sampai ke bawah, ibu, nenek dari bapak dan nenek dari ibu terus ke atas, saudari kandung, saudari sepapak, saudari seibu, istri dan .. Semua orang ini adalah ahli waris menurut ijma ulama. Jika mereka semua ada sebagai ahli waris, maka hanya ada 5 orang yang saat itu berhak mendapatkannya, yaitu: istri, anak wanita, cucu wanita dari anak laki-laki, ibu dan saudari kandung. Jika mungkin semua laki-laki dan wanita ini ada sebagai ahli waris, maka hanya kedua orang tua, anak laki-laki dan anak wanita dan suami atau istri. Dalil apa yang kami sudah sebutkan ini adalah ijma ulama dan nash-nash yang akan datang.”⁴⁹

Al-Hajjawi salah seorang ulama dalam mazhab Hanbaliah dalam kitabnya al-Iqna` li Tholib al-Intifa` menjelaskan:

ومن الإناث سبع البنات وبنات الابن وان سفلى
أبوها والأم والجدة والأخت من كل جهة
والزوجة ومولاة النعمة:

Ahli waris yang diijmakan dari kalangan wanita ada 7, yaitu: anak wanita, cucu wanita dari anak laki-laki dan seterusnya, ibu, nenek, saudari, istri dan

g. Hak Baiat

Baiat pada asalnya sebuah perjanjian atau kesepakatan yang wajib dipenuhi. Akan tetapi baiat dalam pengertian fiqih adalah perjanjian untuk mentaati pemimpin negeri atau wilayah.

⁴⁹ Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar Fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000, cet ke-1, hal. 2/26

Ibnu Khaldun mengatakan dalam kitabnya, Al Muqadimah, "Bai'at ialah janji untuk taat. Seakan-akan orang yang berbai'at itu berjanji kepada pemimpinnya untuk menyerahkan kepadanya segala kebijaksanaan tentang urusan dirinya dan urusan kaum muslimin, sedikitpun tanpa menentanginya; serta taat kepada perintah pimpinan yang dibebankan kepadanya, suka maupun tidak."

Shiddiq Hasan Khan (wafat:1307 H) dalam bukunya 'Ikhlil al karamah' hal:26 mengatakan: Ketahuilah bahwa bai'at adalah berjanji untuk taat, seolah-olah seorang yang berbai'at berjanji kepada pemimpinnya untuk menyerahkan kepadanya urusan dirinya dan urusan kaum muslimin untuk tidak menentanginya pada masalah apapun dalam urusan itu serta mentaatinya pada apa yang ia bebaskan kepadanya dari perintahnya baik dalam keadaan suka atau duka.

Dulu jika mereka berbaiat kepada pimpinan dan mengikat janjinya mereka meletakkan tangan di atas tangan pemimpinnya untuk menekankan janji itu, sehingga dengan itu mereka menyerupai perbuatan penjual bersama pembelinya maka dinamailah Bai'at. Bentuk mashdar dari kata (باع) -yang berarti menjual- sehingga jadilah kata bai'at berarti berjabat tangan.

Bai'at secara bahasa berasal dari kata بائع-مُبايعَة yang bermakna saling mengikat janji. Disebut mubaya'ah karena diserupakan seperti dua orang yang saling menukar harta, di mana salah satunya menjual hartanya kepada yang lain. (Lihat Lisanul 'Arab 8/26, 'Umdatul Qari 1/154, Tajul 'Arus 20/370)

Adapun secara istilah, diterangkan oleh Badruddin Al-'Aini: "Seorang imam

mengikat perjanjian (untuk taat) terhadap apa yang dia perintahkan kepada manusia.” (‘Umdatul Qari, 1/154)

‘Aisyah rda berkata:

لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ، غير أنه يبايعهن بالكلام
(رواه البخاري 5288 ومسلم 1866).

“Demi Alloh, tangan Rasulullah saw tidak pernah menyentuh tangan wanita sedikitpun. Beliau saw memberlakukan baiat dengan ucapan”. (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)⁵⁰

An-Nawawi rhm berkata tentang hadis ini:

فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ
كف .

“Di dalam nya ada kandungan bahwa baiat wanita itu dengan ucapan tanpa diambil dengan berjabatan tangan.

C. PENUTUP

Fiqh Islam telah memberikan gambaran terperinci tentang hak-hak wanita di seluruh sisi kehidupannya, baik hak umum maupun khusus. Hak-hak yang banyak dibahas dalam fiqh Islam adalah hak-hak yang terkait dengan hukum, karena memang di sinilah ranah fiqh Islam. Hak-hak wanita yang banyak dibahas dalam Fiqh Islam antara lain:

1. Hak Sholat berjamaah
2. Hak Menentukan Pilihan Pendamping
3. Hak Mahar

4. Hak Nafkah
5. Waris
6. Hak Jual Beli atau Bisnis
7. Hak Baiat

Semua hak ini menggambarkan semua bab dalam masalah hukum yang melekat dalam kehidupan wanita, baik di bidang publik, bidan ibadah maupun di bidang rumah tangga dan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya
- DRS. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, AMZAH, Jakarta, 2010,
- Abdul Madjid, *pokok-pokok fiqh mu'amalah dan hukum kebendaan dalam islam*,
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1986,
- Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ali Al-Hajjaj al-Ghamidi, *Fikih Wanita (Dalil al-Mar'ah al-Muslimah)*, terjemah Ahmad Syarif, Solo: Aqwam, 2015, cet ke-7
- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarah Raudh al-Thalib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Thayyibah, 1422 H.
- Manshur bin Yunus Al-Buhuti, *Kasysyaf Al-Qinna'*, Kairo: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1423 H'
- ‘Alau al-Din al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai'*, Dar al-Kuttub al-`Arabiyy, 1433 H

50

- Ali bin Abu Bakr al-Marghiyani, *Al-Hidayah Syarah Bidayatu Al-Mubtadi*, Beirut: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1420 H
- Muhammad bin Ali Al-Hashkafi, *Al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1423 H
- Muhammad bin Abdullah al-Khurasyi, *Syarh Mukhtashar Khalil*, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Muhammad bin Ahmad Ad-Dardir , *Al-Syarhu al-Shaghir*, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- ¹ Muhammad bin Ahmad 'Illisy, *Manhu al-Jalil Syahr 'Ala Mukhtashar Khalil*, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1426 H
- Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1426
- Muhammad bin Ahmad Syihabuddin al-Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984, cet ke-1
- Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah, *Majmu` al-Fatawa*, Saudi Arabia: Majma` Malik Fahd, 1995
- Muhammad bin Abdul Wahid bin Humam, *Fathul Qadir*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, *jilid 3*
- Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- An-Nawawi, *Raudhatu Ath-Thalibin*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991, cet ke-3
- Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-Kafi fi Fiqhi Al-Imam Ahmad*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1990
- Alauddin Ali bin Sualiman Al-Mardawi, *Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf*, Kairo: Hajr Li al-Thiba`ah, 1995, Cet ke-1
- Ali bin Ahmad bin Hazm, *Al-Muhalla bil Atsar*, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Muhammad bin Ahmad Juzai Al-Kalbi, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*
- Zakaria Al-Anshari, *Asnal Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib*, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2000
- Zainuddin bin Nujaim, *Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq*, Beirut: Dar al-Ma`rifah, tt
- Ahmad bin Ghanin Syihabuddin An-Nafarawi, *Al-Fawakih Ad-Dawani Ala Risalah Ibnu Abi Zaid al-Qarawani*, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1990
- Mahmud bin Ahmad Abul Khatab Al-Kalwadzani , *Al-Hidayah 'ala Madzhabi Al-Imam Ahmad*, Kairoh: Muassasah Gharras, 2004
- Muhammad bin Muhammad Al-Babarty, *Al-'inayah Syarhul Hidayah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi, *Hasyiatu Ash-Shawi Ala Asy-Syarhi Ash-Shaghir*, Kairoh: Dar al-Ma`arif, tt
- Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar Fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000